

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Manajemen Laba

Setiap perusahaan pasti menginginkan laba yang besar dan kepercayaan para investor. Mereka melakukan segala cara agar data laporan keuangannya terlihat lebih baik. Dalam laporan keuangan, ada beberapa jenis laba seperti laba kotor, laba bersih operasi, laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak (Shatu, 2016). Banyak perusahaan yang lebih memilih cara yang instan, salah satunya adalah dengan cara melakukan manajemen laba. Selain instan, manajemen laba juga memiliki resiko yang sangat besar.

Dari sudut pandang perekonomian nasional, secara mikro manajemen laba mengakibatkan perusahaan yang melakukannya bagaikan menyimpan “bara dalam sekam”. Artinya, meski manajemen laba dapat disembunyikan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang perusahaan bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan, kolaps, bahkan bangkrut. Sedangkan secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik (Sulistyanto, 2018)

Perbuatan ini dikategorikan sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomis perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Apalagi perbuatan ini dilakukan manajer dengan memanfaatkan kelemahan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan (Sulistyanto, 2018).

Sementara para akademisi, termasuk peneliti, berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan ada beragam metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles*) (Sulistyanto, 2018).

Ada alasan utama mengapa seorang manajer perusahaan mengelola dan mengatur laba padahal aktivitas ini cenderung melanggar peraturan. Secara sederhana, seorang manajer mengelola laba adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham (*stockholders*) perusahaan yang dikelolanya. Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik serta mempunyai hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Pemilik selalu mendorong dan mendesak manajer untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat lebih cepat dan besar. Sedangkan manajer bersedia melakukan hal itu bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun juga untuk memaksimalkan kesejahtraannya sendiri (Sulistyanto, 2018).

Terdapat tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*positive accounting theory*), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu (Sulistyanto, 2018):

1. *Bonus plan hypothesis*

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa “manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan yang dilaporkan periode berjalan”.

2. *Debt (equity) hypothesis*

*Debt (equity) hypothesis* yang menyatakan bahwa “Semakin besar rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan”.

3. *Political cost hypothesis*

*Political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa “Perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan kecil lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan”.

Komponen akrual terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode

yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accruals* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, misalkan kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi prosentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya (Sulistyanto, 2018).

Sedangkan *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi (Sulistyanto, 2018).

Atas dasar pemikiran bahwa komponen akrual yang bebas dipermainkan dengan kebijakan manajerial adalah *discretionary accruals*, maka sebagian besar model manajemen laba mengukur atau memproksikan aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan komponen *discretionary accruals*. Hingga atas dasar pemikiran itu, yaitu total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*, model dasar untuk menghitung manajemen laba dapat dirumuskan sebagai berikut (Sulistyanto, 2018):

$$TAC_t = DA_t + NDA_t$$

Keterangan :

$TAC_t$  = Total akrual periode-t.

$DA_t$  = *Discretionary accruals* periode-t.

$NDA_t$  = *Nondiscretionary accruals* periode-t.

Apabila  $TAC_t = Laba_t - CFO_t$  dirumuskan sebagai  $Labat = CFO_t - TAC_t$ , maka formula di atas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

$$Labat = CFO_t + DA_t + NDA_t$$

Keterangan :

$CFO_t$  = Arus kas dari operasi periode-t.

$DA_t$  = *Discretionary accruals* periode-t.

$NDA_t = \text{Nondiscretionary accruals periode-t.}$

Model akuntansi akrual di atas dengan jelas menunjukkan bahwa laba akuntansi terdiri dari komponen arus kas operasi, *discretionary accruals*, dan *nondiscretionary accruals*. Secara spesifik model ini juga menunjukkan bahwa untuk mendeteksi manajemen laba dimulai dengan menghitung laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya laba ini dipecah menjadi laba kas dan laba non kas akrual untuk menentukan jumlah laba akrual untuk menghitung nilai *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals* (Sulistyanto, 2018).

Secara konseptual model di atas memang sudah dapat dipakai untuk mendeteksi manajemen laba meski dalam perkembangannya model di atas diurai lebih detail untuk mendeteksi komponen-komponen dasar yang dipakai untuk mempermainkan besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Upaya ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa untuk mengatur laba, manajer dapat mempermainkan semua komponen laporan keuangan, baik komponen lancar (*current*) maupun jangka panjang (*long-term*). Maka upaya ini sebenarnya untuk mengidentifikasi kecenderungan manajerial dalam melakukan manajemen laba, apakah cenderung menggunakan komponen lancar atau jangka (*long-term assets*). Untuk itu *discretionary accruals* dipecah menjadi *discretionary current accruals* dan *discretionary long-term accruals*, demikian juga dengan *nondiscretionary accruals* yang dapat dipecah menjadi *nondiscretionary current accruals* (NDCA) dan *nondiscretionary long-term accruals* (NDLTA) dan dirumuskan sebagai berikut: (Sulistyanto, 2018)

$$TAC_t = (DCA_t + DLTA_t) + (NDCA_t + NDLTA_t)$$

Keterangan :

$TAC_t$  = Total akrual periode-t.

$DCA_t$  = *Discretionary current accruals* periode-t.

$DLTA_t$  = *Discretionary long-term accruals* periode-t.

$NDCA_t$  = *Nondiscretionary current accruals* periode-t.

$NDLTA_t$  = *Nondiscretionary long-term accruals* periode-t.

Apabila  $TAC_t = Laba_t - CFO_t$  dirumuskan sebagai  $Labat = CFO_t - TAC_t$ , maka formula di atas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut: (Sulistyanto, 2018)

$$Labat = CFO_t + (DCA_t + DLTA_t) + (NDCA_t + NDLTA_t)$$

Keterangan :

$CFO_t$  = Arus kas dari operasi periode-t.

$DCA_t$  = *Discretionary current accruals* periode-t.

$DLTA_t$  = *Discretionary long-term accruals* periode-t.

$NDCA_t$  = *Nondiscretionary current accruals* periode-t.

$NDLTA_t$  = *Nondiscretionary long-term accruals* periode-t.

Untuk dapat mendeteksi manajemen laba, salah satu model yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut: (Sulistyanto, 2018)

$$TAC = \text{Net income} - \text{Cash flows from operations}$$

Model deangelo mengukur atau memproksikan manajemen laba dengan *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya. Atau dirumuskan sebagai berikut: (Sulistyanto, 2018)

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

$NDA_t$  = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

$TAC_t$  = Total akrual periode t.

$TA_{t-1}$  = Total aktiva periode t-1

Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba dan dirumuskan sebagai berikut: (Sulistyanto, 2018)

$$DA = TAC - NDA \quad (2.1)$$

### 2.1.2 Dewan Komisaris Independen

Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (Sudarmanto, 2021):

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Sikap pasif ini atau sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham (minoritas) serta para *stakeholder* lainnya (Surya, 2020).

Fenomena ini terjadi karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang bukan didasarkan

pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai penghormatan atau penghargaan sehingga loyalitas diberikan pada pemberi jabatan. Ada dua badan yang terpisah dalam suatu perusahaan, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Komisaris independen dikenal pada *two tiers system*. Indonesia menganut sistem ini sehingga Indonesia menggunakan istilah komisaris independen (Surya, 2020).

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi (Surya, 2020):

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak rupa pemegang saham (*fairness*);
- d. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini;
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin terjadinya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinasi kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam

mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang makin menurun (Hasnati, 2014).

Secara sistematis, dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2009):

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3 Komite Audit

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Surya, 2020).

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Surya, 2020).

Salah satu anggota komite audit wajib memiliki keahlian di bidang keuangan. Dewan pengurus perusahaan di Indonesia terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Hal ini dikarenakan Indonesia mengikuti "*two tier board system*". Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan (Kusmayadi, 2015)

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya, 2020).

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu (Surya, 2020):

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasannya yang dilakukan oleh auditor internal.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review system* pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektifitas audit (Effendi, 2021).

Komite audit mempunyai wewenang, yaitu (Surya, 2020):

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu;
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Pengukuran komite audit dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan. Secara sistematis, dapat dirumuskan sebagai berikut (Kelana, 2005):

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal (Febriana, 2021)

Pemilik perusahaan dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan akan dapat tercapai (Febriana, 2021).

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi. Artinya bahwa rasio ini mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Sebagai investor melihat rasio profitabilitas sangatlah perlu, mengingat tujuan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan dari menanam modal di perusahaan (Febriana, 2021).

Tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas, yaitu (Febriana, 2021):

1. Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi
2. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu

3. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal yang digunakan maupun modal sendiri
4. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri

Sementara manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu (Febriana, 2021):

1. Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu
2. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu
3. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya
4. Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak
5. Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan

Hasil pengembalian atas aset (*return on assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset (Hery, 2017).

Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen yang menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2015).

Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Sebagai investor melihat rasio profitabilitas sangatlah perlu,

mengingat tujuan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan dari menanam modal di perusahaan (Febriana, 2021).

Adapun rumus dalam menghitung profitabilitas adalah sebagai berikut (Febriana, 2021):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (2.4)$$

### 2.1.5 Perencanaan Pajak

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2014).

Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2014).

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni (Pohan, 2014):

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan

perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tidak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tujuan perencanaan pajak secara umum adalah sebagai berikut (Pohan, 2014):

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.  
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara besar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
  1. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
  2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23).

*Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang dihitung sebagai perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar dengan dasar pengenaan pajak; rasio pendapatan anggaran dari pajak, dengan jumlah penghasilan kena pajak, menentukan tarif pajak efektif. Tarif pajak penghasilan efektif sudah memperhitungkan semua unsur yang menentukan penghitungan dasar pengenaan pajak penghasilan. Tarif pajak

penghasilan efektif sudah mengacu pada jumlah sebenarnya dari beban pajak yang terutang oleh wajib pajak tertentu (Harumova, 2016).

ETR dapat dihitung dengan perbandingan antara beban pajak dan jugak laba sebelum pajak. Adapun rumus menghitung perencanaan pajak adalah sebagai berikut (Harumova, 2016):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.5)$$

### 2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur Kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan Keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap suatu perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dengan outsider melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan (Subagyo, 2017).

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik (Sudana, 2015).

Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar (Trisnawati, 2021).

Kepemilikan manajerial dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Sugiarto, 2009):

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7 Kualitas Audit

Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu seorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya (Tandiontong, 2016).

Reputasi auditor diukur dengan kompetensi cerapan (*perceived*) dan independensi cerapan. Reputasi akan menghasilkan informasi yang kredibel. Kredibilitas informasi sendiri diukur dengan derajat keyakinan pengguna atas satu informasi. Kualitas informasi ini bisa bervariasi antarpengawasan dan antarwaktu. Ukuran ini lebih tepat sebagai ukuran kualitas audit karena lebih berhubungan dengan kondisi aktual (Tandiontong, 2016).

Kualitas audit (*Quality Audit*) adalah probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi (Nurdiono, 2016).

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dll. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut (Tandiontong, 2016).

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah dan masyarakat serta para investor. Investor akan lebih

cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Tandiontong, 2016).

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Tandiontong, 2016).

Kualitas audit sulit diukur secara objektif, sehingga para peneliti menggunakan berbagai dimensi kualitas audit yang berbeda-beda. Dimensi untuk mengukur kualitas audit tersebut terdiri dari (Tandiontong, 2016):

1. Dimensi kualitas teknis, terdiri dari indikator :
  - a. Reputasi
  - b. Kemampuan
  - c. Jaminan
  - d. Hubungan auditor-klien
2. Dimensi kualitas jasa, terdiri dari indikator :
  - a. Empati
  - b. Daya tanggap
  - c. Jasa non-audit
3. Dimensi hubungan auditor-klien, terdiri dari indikator :
  - a. Keahlian
  - b. Pengalaman
  - c. Status
4. Dimensi Independensi hanya terdiri dari satu indikator, yaitu obyektivitas.

Pada penelitian ini, pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah *dummy*. Yaitu 1 untuk yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan 0 untuk yang tidak diaudit oleh KAP *Big Four*.

## 2.2 Review Peneliti Terdahulu

1. Anton Ferry Ananda dan Santri Andriani melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah *go public* dalam periode 2015-2017. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 120 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Anton, 2019).
2. Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Tax Planing*, Ukuran Perusahaan, *Coporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Manajemen Laba”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 8 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax planning*, ukuran perusahaan, dan *Coporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Wardani, 2018).
3. Fibria Anggraini Puji Lestari melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba”. Objek penelitian ini adalah perusahaan perusahaan minyak bumi di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2017. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 10 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba (Lestari, 2018).

4. Jihan Muthiah Khairunnisa, Majidah, dan Kurnia Melakukan penelitian tahun 2020 dengan judul “Manajemen Laba: Financial Distress, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Kualitas Audit”. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi periode 2015-2018. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Sampel yang diambil sebanyak 29 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress, perencanaan pajak, ukuran perusahaan, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan Financial Distress, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Khairunnisa, 2020) .
5. Novida Adarapta dan Erni Yanti Natalia melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak, Tata Kelola Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba di BEI”. Objek penelitian ini adalah badan usaha pada bidang perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 14 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan beban pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial dan beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Adarapta, 2020).
6. Pasek Wayan Gejen Tatar dan Edy Sujana melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Employee Diff* dan Risiko Litigasi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 99 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial, *Employee diff* dan Risiko litigasi berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial, *Employee diff* dan Risiko

litigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba (Sujana, 2021).

7. Rodhiya Maulidah dan Rahmat Agus Santoso melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 117 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial menunjukkan bahwa Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Santoso, 2020).
8. Sofiatu Solihah dan Mega Rosdiana melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba”. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian regresi linear berganda. Sampel yang diambil sebanyak 10 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan Komite Audit dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Rosdiana, 2022).
9. Yogi Maulana Putra dan Kurnia melakukan penelitian tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 14 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan,

beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Putra, 2020).

**Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
Anton Ferry Ananda dan Santri Andriani (2019)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. Dewan Komisaris Independen b. Komite Audit	<u>Secara simultan :</u> Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba  <u>Secara parsial :</u> Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi (2018)	Pengaruh <i>Tax Planing</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Manajemen Laba	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. <i>Tax Planing</i> b. Ukuran Perusahaan c. <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR)	<u>Secara simultan :</u> <i>Tax planning</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.  <u>Secara parsial :</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba b. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba c. <i>Tax planning</i> tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba
Fibria Anggraini Puji Lestari (2018)	Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. Profitabilitas b. Beban Pajak Tangguhan	<u>Secara simultan :</u> Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.  <u>Secara parsial :</u> Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba
Jihan Muthiah Khairunnisa, Majidah, dan	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Perencanaan Pajak,	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba	<u>Secara simultan :</u> <i>Financial Distress</i> , Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan,

**Lanjutan Tabel 2.1**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
----------------------	--------------	----------------------------	-----------------------------

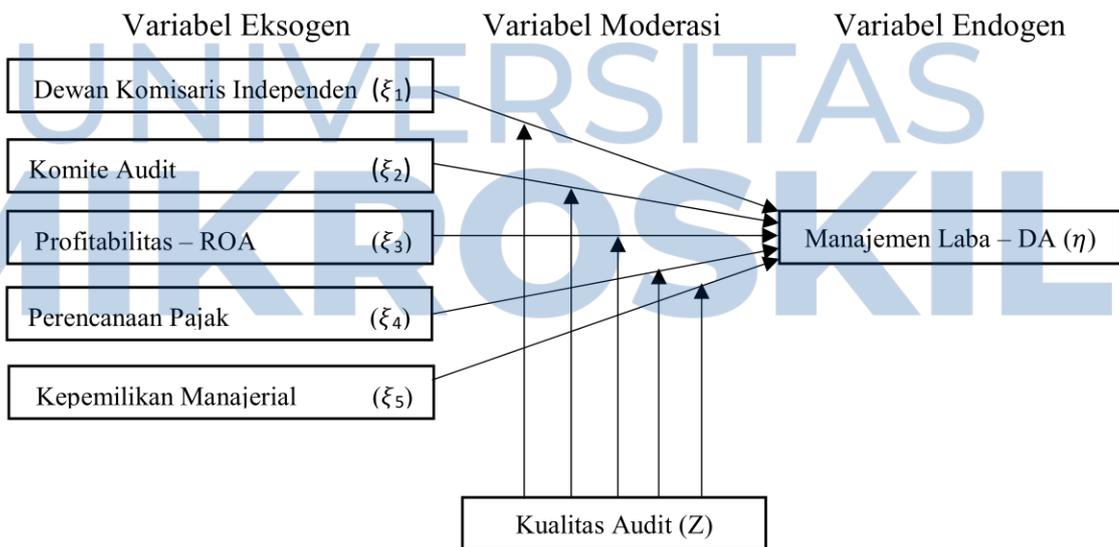
Jihan Muthiah Khairunnisa, Majidah, dan Kurnia (2020)	Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Kualitas Audit.	<u>Independen :</u> a. <i>Financial Distress</i> b. Perencanaan pajak c. Ukuran Perusahaan d. Komite Audit e. Kualitas Audit	Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap manajemen laba.  <u>Secara parsial :</u> a. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba b. <i>Financial Distress</i> , Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Novida Adarapta dan Erni Yanti Natalia (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Tata Kelola Perusahaan dan Beban Pajak	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. Perencanaan pajak b. Kepemilikan manajerial c. Beban pajak tangguhan	<u>Secara simultan :</u> Perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.  <u>Secara parsial :</u> a. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba c. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
Pasek Wayan Gejen Tatar dan Edy Sujana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, <i>Employee Diff</i> dan Risiko Litigasi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. Kepemilikan Manajerial b. <i>Employee Diff</i> c. Risiko Litigasi	<u>Secara simultan :</u> Kepemilikan manajerial, <i>Employee diff</i> dan Risiko litigasi berpengaruh terhadap manajemen laba.  <u>Secara parsial :</u> Kepemilikan manajerial, <i>Employee diff</i> dan Risiko litigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba
Rodhiya Maulidah dan Rahmat Agus Santoso (2020)	Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	<u>Dependen :</u> Manajemen Laba  <u>Independen :</u> a. Kualitas Audit b. Ukuran Perusahaan c. <i>Leverage</i>	<u>Secara simultan :</u> Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba  <u>Secara parsial :</u> a. Kualitas Audit berpengaruh terhadap manajemen laba b. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba c. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh

**Lanjutan Tabel 2.1**

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
---------------	-------	---------------------	----------------------

				terhadap manajemen laba.
Sofiatus Solihah dan Mega Rosdiana (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba.	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas	<p><u>Dependen :</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Independen :</u> a. Dewan Komisaris Independen b. Komite Audit c. Profitabilitas</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secaral parsial :</u> a. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba b. Komite Audit dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan</p>
Yogi Maulana Putra dan Kurnia (2020)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak	<p><u>Dependen:</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Independen :</u> a. Aset Pajak Tangguhan b. Beban Pajak Tangguhan Perencanaan Pajak</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secaral parsial :</u> a. Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. b. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, variabel endogen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah Dewan

Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial. Sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Kualitas Audit.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi

Dewan komisaris independen dari luar perusahaan akan lebih baik karena dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba (Rosdiana, 2022).

Kualitas audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dewan komisaris independen. Hal ini dapat dilihat dari usahanya dalam meminimalisir manajemen laba. Dan juga memudahkan auditor dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1a</sub> : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

H<sub>2a</sub> : Kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris dengan manajemen laba.

### 2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi

Aktivitas komite audit yang teratur dan efektif pasti akan menghasilkan penjiagaan yang baik dan tentunya dapat membantu dalam melacak suatu penyimpangan yang dilakukan pada laporan keuangan, sehingga akan meminimumkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti manajemen laba. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba (Khairunnisa, 2020).

Kualitas audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komite audit. Hal ini dapat dilihat dari kinerja komite audit yang dapat membantu auditor dalam melacak penyimpangan laporan keuangan seperti manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1b</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

H<sub>2b</sub> : Kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara komite audit dengan manajemen laba.

#### **2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi**

Profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Profitabilitas yang terlalu rendah tentunya berdampak bagi penilaian kinerja manajer. Manajer akan cenderung menaikkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangannya. Namun, profitabilitas yang terlalu tinggi justru membuat manajer cenderung menurunkan laba yang dilaporkan dengan tujuan mengatur jumlah bonus yang diperoleh manajer. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba (Lestari, 2018).

Kualitas audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Apabila profitabilitas tinggi, dapat menyebabkan manajer menurunkan laba. Sedangkan apabila profitabilitas rendah, maka manajer akan menaikkan laba yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini terjadi karena profitabilitas mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, auditor sangat dibutuhkan perusahaan agar mendeteksi manajemen laba di perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1c</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.

H<sub>2c</sub> : Kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba.

#### **2.4.4 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel Moderasi**

Besarnya pajak, seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Nurdiono, 2016). Sehingga semakin besar tingkat perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen maka akan semakin tinggi manajemen laba yang akan terjadi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba (Adarapta, 2020).

Kualitas audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dan dapat menguntungkan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen mengakibatkan perusahaan dirugikan, karena laporan keuangan tidak sesuai dengan laporan yang sebenarnya. Sehingga KAP harus memeriksa dan mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1d</sub>: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

H<sub>2d</sub>: Kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.

#### **2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi**

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba karena semakin besar kepemilikan manajerial maka tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan semakin menurun. Sehingga pihak manajemen akan efisien memilih metode akuntansi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pihak manajer akan mengawasi pihak internal perusahaan sehingga akan mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba (Sujana, 2021).

Kualitas audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepemilikan manajerial. Hal ini dapat dilihat dari baik tidaknya penerapan mekanisme tata kelola perusahaannya. Apabila tata kelola perusahaan tidak menerapkannya dengan baik, maka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih mudah. Sehingga auditor dapat berperan efektif dalam meminimalisir tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1e</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

H<sub>2e</sub>: Kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba.